

Checklist Kepatuhan UMKM 2026

Pajak · Legalitas · Pelaporan — diringkas dari panduan Hopemity, mengacu PP 20/2026, PMK 81/2024, dan UU KUP.

Cara pakai: centang yang sudah beres, tandai yang belum. Kalau banyak yang belum tercentang — itu normal; sebagian besar founder mulai dari titik yang sama. Prioritaskan tiga yang paling mendesak, sisanya bisa dibahas dengan kami gratis di WhatsApp (+62 859 3975 3313) sebelum kamu memutuskan apa pun.

01 BADAN USAHA & LEGALITAS

- ☐ Jenis badan usaha sudah sesuai kondisi sekarang (OP / PT Perorangan / PT / CV).
Struktur yang tidak pas bikin kamu bayar pajak lebih besar dari seharusnya.
- ☐ PT Perorangan: pemegang saham masih 1 orang.
Saham bertambah = wajib dialihkan jadi PT biasa (akta notaris + disahkan Kemenkumhum).
- ☐ PT Perorangan: usaha masih dalam kriteria usaha mikro-kecil.
Melewati kriteria juga mewajibkan pengalihan ke PT biasa.
- ☐ KBLI yang terdaftar sesuai kegiatan usaha sebenarnya.
KBLI keliru = perizinan dan perlakuan pajak bisa ikut keliru.
Belum yakin KBLI-nya? Cari gratis: hopemityconsulting.com/tools/cari-kbli
- ☐ NIB sudah terbit dan aktif di OSS.
NIB adalah izin dasarnya; tanpa ini, usaha dianggap belum resmi beroperasi.

02 PPH FINAL 0,5% SETELAH PP 20/2026

- ☐ Konfirmasi: usahamu masih berhak tarif 0,5%.
PP 20/2026 mengubah siapa yang berhak dan sampai kapan.
- ☐ Orang pribadi: pahami fasilitas omzet Rp500 juta pertama bebas pajak.
Fasilitas ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi.
- ☐ PT Perorangan: hitung 0,5% dari seluruh omzet.
PT Perorangan tidak mendapat fasilitas Rp500 juta.
- ☐ CV terdaftar 2024: pastikan sisa masa 0,5%-mu.
Selesai di tahun pajak 2027 — setelah itu tarif umum + wajib pembukuan.
- ☐ Freelancer kreatif / content creator: siapkan tarif umum.
PP 20/2026 menegaskan profesi ini pekerjaan bebas, tidak memakai 0,5%.
- ☐ Omzet mendekati Rp4,8 miliar? Rencanakan transisinya.
0,5% berlaku sampai Desember tahun berjalan; tahun berikutnya tarif umum dan kemungkinan wajib dikukuhkan sebagai PKP.
Simulasikan sendiri: hopemityconsulting.com/tools/kalkulator-pph-final-umkm

03 RUTINITAS PAJAK BULANAN (PMK 81/2024)

- ☐ Tanggal 1–5: tutup buku bulan sebelumnya.
Rekap omzet, gaji, dan pembayaran ke vendor sebelum semua jatuh tempo.
- ☐ Setor PPh Final UMKM 0,5% paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Setoran ber-NTPN otomatis dianggap sebagai SPT Masa — tidak perlu lapor terpisah.

- ☐ Ada karyawan / bayar gaji? Setor PPh 21/26 tanggal 15, lapor tanggal 20.
PMK 81/2024 menyatukan tanggal setor dan lapor untuk semua pajak masa.
- ☐ Jatuh tempo kena akhir pekan / libur / cuti bersama? Pindah ke hari kerja berikutnya.
Aturan penggeseran berlaku otomatis — tapi jangan diandalkan tiap bulan.
- ☐ Simpan semua bukti setor (NTPN) secara rapi.
Ini modal SPT Tahunan dan pertahananmu kalau ada koreksi.

04 SPT TAHUNAN & SANKSI

- ☐ SPT Tahunan orang pribadi: lapor maksimal 31 Maret.
Denda telat lapor Rp100.000.
- ☐ SPT Tahunan badan (PT/CV): lapor maksimal 30 April.
Denda telat lapor Rp1.000.000.
- ☐ Telat setor pajak? Hitung bunanya.
Bunga per bulan sesuai ketentuan Menteri Keuangan, dihitung dari jatuh tempo sampai tanggal bayar.
- ☐ Sudah / hampir jadi PKP? Pahami kewajiban PPN-mu.
SPT Masa PPN telat lapor = denda Rp500.000 per bulan.

05 PEMBUKUAN & ANGKA

- ☐ Catat omzet setiap bulan — sekecil apa pun angkanya.
Di bawah Rp500 juta pun wajib: ini dasar hitung batas kumulatif dan SPT Tahunan.
- ☐ Pisahkan rekening dan uang usaha dari uang pribadi.
Pembukuan rapi dimulai dari pemisahan ini, bukan dari software.
- ☐ Punya laporan bulanan yang bisa kamu baca sendiri.
Angka yang tidak terbaca = keputusan bisnis menebak-nebak.

Ada yang belum tercentang?

Justru itu gunanya checklist ini. Pilih tiga yang paling mengganjal, lalu ngobrol dulu dengan kami — konsultasi pertama gratis, tanpa jargon, tanpa paksaan. Kalau mau lanjut, baru kita susun rencananya.

WhatsApp +62 859 3975 3313 · hopemityconsulting.com · mattsteff@hopemityconsulting.com

Sumber & alat bantu

Panduan lengkap (Bahasa Indonesia): hopemityconsulting.com/panduan — PPh Final 0,5% pasca PP 20/2026 · Jadwal pajak bulanan · KBLI 2025 & NIB · PT Perorangan vs PT vs CV.

Kalender jatuh tempo otomatis 2026–2027: hopemityconsulting.com/tools/kalender-pajak · Peraturan: PMK 81/2024 (JDIH BPK), DJP (pajak.go.id), UU KUP.

Checklist ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat pajak atau hukum untuk kasus spesifikmu. © 2026 PT Hopemity Hikmat Prestasi — IDX Building Tower 2 Lt. 23, Jakarta 12190.